

**IMPLEMENTASI HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PELAYANAN
KESEHATAN**

(Studi Di Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Banyumas)

Oleh:

PAULINA SARAH PUSPITA

E1A016313

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan dan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan *content analysis* dan *comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas sebagian besar telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) parameter yang didasari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan meliputi: terlaksananya pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan dengan baik; belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan; terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan baik; tersedianya dukungan sarana dan prasarana terhadap program jaminan kesehatan dengan baik; tersedianya biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan baik; terlaksananya bentuk/jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dengan baik. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas adalah faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Purwokerto.

Kata Kunci: *Implementasi Hukum; Jaminan Kesehatan; Masyarakat Miskin; Pelayanan Kesehatan*

**IMPLEMENTATION OF THE LAW FOR THE IMPLEMENTATION OF
HEALTH INSURANCE FOR THE POOR IN HEALTH SERVICES**

(Study at the Banyumas District Health Office and BPJS Health)

By:

PAULINA SARAH PUSPITA

EIA016313

ABSTRACT

This study aims to determine the legal implementation of health insurance for the poor in health services and the factors that tend to influence the implementation of the law on the implementation of health insurance for the poor in health services in Banyumas Regency. This study uses qualitative research methods with sociological juridical approach, and descriptive research specifications. The research locations are the Health Office, BPJS Health, and the Banyumas District Social Service. The types of data used are primary data and secondary data. The primary data collection method is by interviewing while the secondary data is by literature study and documentary study. The data processing method is done by data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of a qualitative matrix and narrative text. The data analysis method was carried out by qualitative analysis using content analysis and comparative analysis. The results showed that the implementation of the law on the implementation of health insurance for the poor in health services in Banyumas Regency was mostly well implemented. This can be seen from the 6 (six) parameters based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2018 concerning Health Insurance including: the implementation of registration of health insurance participation properly; community participation in the health insurance program has not been maximized; the implementation of good health service delivery; the availability of supporting facilities and infrastructure for the health insurance program properly; the availability of good health insurance costs; implementation of the form / type of health services that are guaranteed well. The factors that tend to influence the legal implementation of health insurance for the poor in health services in Banyumas Regency are factors that can hinder and support the implementation of the law on the implementation of health insurance for non-PBI participants in health services at BPJS Kesehatan Purwokerto.

Keywords: Law Implementation; Health insurance; Poor society; Health services